

**PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN PEGAWASAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PALOPO**

Nurhayati¹⁾,A.Dahri²⁾,Haedar³⁾

Jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis, universitas muhammadiyah

Palopo Jln. Jenderal sudirman KM 03. Kota Palopo

E-mail

¹⁾nhur18720@gmail.com

ABSTRACK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi, pengawasan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada kantor pemerintah Kota Palopo. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan Kuesioner yang di sebarakan langsung kepada karyawan Pemerintahan Kota Palopo. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pegawai kantor BPKAD Kota Palopo. Porpositive sampling digunakan dengan total sampel 45 responden dan Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda ditemukan bahwa sistem informasi akuntansi, tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan pengawasan keuangan terdapat pengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada kpemerintah Kota Palopo, yang artinya semakin baik sistem informasi akuntansi dan pengawasan keuangan maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pada kantor pemerintah Kota Palopo yang dilakukan.

Kata kunci: Sistem informasi akuntansi, pengawasan keuangan dan nilai informasi pelaporan keuangan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of accounting information systems, financial supervision on the value of financial reporting information at the Palopo City government office. The data collection method used is using a questionnaire which is distributed directly to the employees of the Palopo City Government. The population in this study were employees of the Palopo City BPKAD office. Porpositive sampling was used with a total sample of 45 respondents and the data analysis technique used was multiple linear regression analysis. Based on the results of multiple linear regression analysis, it was found that the accounting information system, has a significant effect on the value of financial reporting information and financial supervision, there was a significan influence on the

value of financial reporting information at the Palopo City government office, which means that the better the accounting information system and financial supervision, the better the value of financial reporting information at the Palopo City government office that is carried out.

Keywords: *Accounting information system, financial supervision and the value of financial reporting information.*

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya otonomi daerah yang merupakan bagian dari reformasi pemerintah pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan daerah, seperti yang mengatur tentang pengelolaan laporan keuangan, menggantikan beberapa kebijakan pemerintah pusat melalui otonomi daerah. Fenomena laporan keuangan pemerintah yang tidak menyajikan informasi yang sesuai peraturan dan masih sering terjadi di kalangan organisasi sektor publik, dan masih banyak ditemukannya penyimpangan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. (Mahayuni, 2017)

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, prakarsa khusus. Sama halnya dengan tingkat daerah, laporan pertanggungjawaban harus disajikan dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan pengguna dalam pengambilan keputusan.

Informasi akan bermanfaat apabila informasi itu dapat mendukung untuk pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Jika informasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh orang-orang, itu sangat membantu. Oleh karena itu, untuk keperluan perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan, pemerintah daerah harus memperhatikan data yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dari pemerintah daerah harus memuat informasi akuntansi yang memenuhi persyaratan tertentu. Tujuan informasi akuntansi harus dipenuhi dengan memasukkan aspek kualitatif laporan keuangan sebagai standar pengukuran. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) mencantumkan kualitas-kualitas berikut sebagai kondisi normatif untuk laporan keuangan pemerintah: 1. relevan; 2. dapat diandalkan; 3. sebanding; dan 4. Dimengerti (Armando, 2013).

Sistem informasi akuntansi yang tidak mapan dan pemantauan yang tidak memadai mungkin menjadi penyebab buruknya kualitas data pelaporan keuangan. Akibatnya, ada kebutuhan untuk memperluas penggunaan sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan manajemen keuangan di sektor ini. Untuk menciptakan sistem jaringan, pemerintah harus memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Dengan menyediakan akses antar unit kerja untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, informasi manajemen dan prosedur kerja memungkinkan pemerintah beroperasi secara terintegrasi. Transaksi yang kompleks dan banyak harus dilakukan di unit akuntansi pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan pemerintah dan pengolahan data transaksi keduanya

akan dipercepat dengan penggunaan teknologi informasi, sehingga mencegah laporan keuangan dari (Pujiswara, 2014)

Optimalisasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan pengungkapan kinerja keuangan pemerintah. Persyaratan sistem akuntansi keuangan daerah adalah menyempurnakan sistem pencatatan dan pelaporan untuk melaksanakan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, hal ini sejalan dengan aksesibilitas laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Aksesibilitas terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas yang efektif bergantung pada akses publik terhadap laporan dan temuan akuntabilitas yang dapat dibaca dan dipahami. Aksesibilitas Pelaporan Keuangan Daerah merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. (Zeny. 2020)

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Kota Palopo dan bagaimana pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Kota Palopo.

Tujuan penelitian

Untuk mendiskripsikan bagaimana pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan

daerah dan pengawasan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah Kota Palopo.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal berkewajiban untuk memberi penghargaan kepada agen atas jasa yang diberikan oleh prinsipal. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal merupakan sumber konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang maksimal. Prinsipal dan agen juga berusaha menghindari risiko (Belkaouli, 2001 dalam Subhan, 2011).

Teori keagenan dalam pemerintahan daerah mulai diterapkan, terutama sejak pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan dapat dipelajari dari dua sudut pandang, yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif kepada rakyat, dampaknya bisa positif dalam bentuk efek, akan tetapi sebagian besar berupa dalam bentuk negatif dalam bentuk peluang perilaku opportunistic (Subhan, 2011).

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2010, SIKD adalah suatu sistem pencatatan, pengelolaan, dan pengolahan data dari pengelolaan keuangan daerah dan sumber lain yang terkait menjadi informasi yang disajikan, dipublikasikan, dan pengambilan keputusan penting dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan membuat keputusan pemerintah daerah. akuntabilitas.

Sedangkan informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berhubungan dengan keuangan daerah yang diperlukan sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

Suatu metode penggabungan, penggolongan, pencatatan, dan pengolahan kegiatan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu laporan keuangan sebagai informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam menentukan pilihan dapat disebut sebagai sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Penerapan sistem informasi akuntansi oleh setiap SKPD dalam proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010. Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan rangkaian yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, peringkasan itu, kemudian beralih ke pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sistem informasi keuangan daerah dapat menyediakan titik akses baru untuk data keuangan. (Rianisanti 2017:40).

Berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 65 Tahun 2010, pemerintah daerah menerapkan sistem informasi keuangan daerah untuk tujuan sebagai berikut:

- 1) Membantu pimpinan daerah dalam mengembangkan kebijakan keuangan yang sehat.
- 2) Membantu pimpinan daerah dan organisasi terkait lainnya menilai kinerja keuangan daerahnya.
- 3) Berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan statistik keuangan daerah
- 4) Menyajikan fakta keuangan daerah secara bebas kepada publik.

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan Daerah Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002).

Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut (Halim, 2004):

- a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dilakukan dengan pengawasan langsung.
- b. Pengawasan ekstern adalah pengawasan pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berbeda diluar unit organisasi yang diawasi. Dalam

hal ini di Indonesia adalah badan pemeriksa keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi Negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

- c. pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan dengan atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.
- d. Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan dilakukan biasanya pada akhir tahun anggaran dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sangat diandalkan oleh banyak pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakainya. Suatu laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam keputusan. Definisi nilai informasi menurut Davis (2002) adalah nilai perubahan dalam perilaku keputusan yang disebabkan oleh informasi dikurangi biaya informasi sedangkan menurut Merriam Webster, nilai informasi bias diartikan sebagai data

dengan artia atau makna atau informasi yang memiliki arti penting dan manfaat yang relative untuk membuat suatu keputusan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif Laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010):

a. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut: 1) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.2) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan masa lalu dan kejadian masa kini.3) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 4) Lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta

dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik berikut: 1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya di sajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 3) Netralitas, yaitu informasi diharapkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan informasi yang termua dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Dapat dipahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang di sesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Komite SAP, 2012)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, seperti yang dikemukakan (Sugiyono 2017:8) bahwa metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk mengaju hipotensis yang telah ditetapkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam penelitian ini adalah

hasil kuesioner yang dibagikan di lokasi, dan diukur menggunakan skala likert. populasi pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan BPKAD kota palopo. Metode pengambilan sampel yang digunakan sebanyak 45 karyawan dengan Metode purposive sampling, Menurut Sugiyono (2015:85) *Purposive sampling* yaitu suatu metodologi pengambilan sampel dengan beberapa pertimbangan, adalah teknik yang digunakan. Kriteria berikut digunakan untuk memilih sampel penelitian yang terlibat dalam penelitian ini adalah pegawai bidang akuntansi dan Spenatausahaan aset daerah di BPKAD kota palopo dan karyawan yang telah bekerja selama kurang lebih 2 tahun lamanya.

Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013:115) Populasi merupakan bidang umum yang berdasarkan subjek atau subjek yang menggunakan ciri yang diidentifikasi oleh peneliti, untuk dipelajari, diselidiki, kemudian disimpulkan. Adapun populasi pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan BPKAD kota palopo.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. pengambilan sampel yang digunakan sebanyak 45 karyawan dengan Metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015:85) *Purposive sampling* yaitu suatu metodologi pengambilan sampel dengan beberapa pertimbangan, adalah teknik yang digunakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *product moment pearson correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} yang merupakan nilai item dari *corrected Item-Total Correlation* > dari r_{tabel} pada signifikansi 0,05 (5%).

Uji Reliabilitas yaitu alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Nilai ketentuan untuk mengukur realibilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,254	3,592		2,577	,014
	Sistem Informasi Akuntansi	,282	,113	,343	2,496	,017
	Pengawasan Keuangan	,258	,121	,293	2,129	,039

a. Dependent Variable: Pelaporan Keuangan

Sumber: Data diolah tahun 2022

Hasil analisis regresi linier berganda yang tampak pada tabel 4.24, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan $\alpha = 0,05$ maka menghasilkan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap Informasi Pelaporan Keuangan. Nilai konstanta untuk variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi sebesar 0,282 Pengawasan Keuangan dengan nilai sebesar 0,258. Atas dasar hasil analisis regresi tersebut, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 9,254 + 0,282 X_1 + 0,258 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh, mempunyai arti sebagai berikut:

1. Nilai konstan sebesar 9,254 bernilai positif yang artinya sistem informasi akuntansi dan pengawasan keuangan bernilai 0 maka variabel pelaporan keuangan mengalami kenaikan sebesar 9,254.
2. Koefisien $b_1 = 0,282$ yang artinya apabila variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi naik satu satuan, maka variabel Informasi Pelaporan Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,282 artinya Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh dalam Informasi Pelaporan Keuangan, dimana semakin tinggi nilai Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan maka semakin meningkat pula Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dapat terjadi.
3. Koefisien $b_2 = 0,258$ yang artinya setiap ada kenaikan variabel Pengawasan Keuangan satu satuan. Maka akan menghasilkan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan sebesar 0,258

Uji koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,453 ^a	,205	,167	1,58673
a. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi				

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2022

Hasil uji *Adjusted R²* menunjukkan nilai koefisien determinasi *R square* sebesar 0,205 atau 20,5%. Hal ini mengidentifikasi bahwa Informasi Pelaporan Keuangan (Y) dipengaruhi sebesar 20,5% oleh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X_1) dan Pengawasan Keuangan (X_2). Adapun sisanya sebesar 79,5% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

Uji F adalah uji bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai signifikan 0,05. Uji Statistik F (Simultan) dapat dilihat pada berikut:

Tabel 3. Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27,234	2	13,617	5,408	,008 ^b
	Residual	105,744	42	2,518		
	Total	132,978	44			
a. Dependent Variable: Pelaporan Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi						

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F Hitung sebesar 5,408 dan F Tabel pada tingkat signifikan 5% sebesar 3,20 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,008, maka dapat disimpulkan bahwa nilai F Hitung sebesar $5,408 > F \text{ Tabel}$ sebesar 3,20 dan nilai sig $0,008 < 0,05$ sehingga variabel sistem informasi akuntansi dan pengawasan keuangan secara bersama- sama berpengaruh terhadap pelaporan keuangan.

1. Hipotesis yang pertama diketahui untuk Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X_1) $t_{hitung} = 2,496 > t_{tabel} = 1,679$ dengan signifikansi $0,017 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan dalam Informasi Pelaporan Keuangan.
2. Hipotesis yang kedua diketahui untuk Pengawasan Keuangan (X_2) $t_{hitung} = 2,129 > t_{tabel} = 1,679$ dengan signifikansi $0,039 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan dalam Informasi Pelaporan Keuangan.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Informasi Pelaporan Keuangan pada Kantor BPKAD Kota Palopo

Dalam hasil penelitian ini, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi menunjukkan terdapat pengaruh dan signifikan terhadap Informasi Pelaporan Keuangan. Dengan kata lain, semakin tinggi Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, maka semakin meningkat pula Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dapat terjadi. Dimana Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dapat diartikan sebagai suatu bentuk penggunaan individu terhadap nilai dan informasi. Maka

secara umum, makna dari penerapan nilai-nilai pengetahuan dalam tiap keyakinan menjadikan individu sebagai bentuk perwujudan dalam bertingkah laku dilingkungannya. artinya jika sistem informasi akuntansi semakin besar dan berarah positif maka informasi pelaporan keuangan akan semakin meningkat, dan sebaliknya jika sistem informasi keuangan semakin rendah maka akan mengakibatkan informasi pelaporan keuangan pada kantor BPKAD Kota Palopo juga akan semakin menurun dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap informasi pelaporan keuangan” diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan dimana pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Dari laporan keuangan dapat dilihat performa suatu perusahaan pada kondisi keuangannya dari hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu. Kinerja suatu perusahaan tergambar dalam laporan keuangan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan oleh pemakai laporan keuangan.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Informasi Pelaporan Keuangan pada Kantor BPKAD Kota Palopo.

Dalam hasil penelitian ini, Pengawasan Keuangan menunjukkan terdapat pengaruh terhadap Informasi Pelaporan Keuangan. Dengan kata lain, semakin tinggi Pengawasan Keuangan, maka semakin meningkat pula Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dapat terjadi. Dimana Pengawasan Keuangan dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam rangka menganalisis lebih lanjut akan tugas dan tanggung jawab yang di laksanakan. Maka secara umum, makna dari penerapan nilai-nilai pengawasan yang di lakukan dalam bertingkah laku dilingkungannya akan sejalan dengan informasi yang di berikan. artinya jika pengawasan keuangan semakin besar dan berarah positif maka informasi pelaporan keuangan akan semakin meningkat, dan sebaliknya jika pengawasan keuangan semakin rendah maka akan mengakibatkan informasi pelaporan keuangan pada kantor BPKAD kota palopo juga akan semakin menurun Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Informasi Pelaporan Keuangan” diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan dengan penelitian ini Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang

baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen. Dimana untuk memperoleh laporan keuangan yang memiliki nilai informasi terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan penelitian ini:

1. Berdasarkan hasil uji t Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima.
2. Berdasarkan hasil uji t Pengawasan Keuangan berpengaruh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima.

Saran

Saran penelitian ini:

1. penelitian selanjutnya dapat mengembangkan beberapa hal yakni memperluas obyek penelitian, dan menambahkan variabel lain yang diperkirakan mempengaruhi informasi pelaporan keuangan seperti pengendalian internal,

ketaatan aturan akuntansi, pencatatan laporan keuangan dan pelaporan pengelolaan keuangan.

2. Pihak BPKAD Kota Palopo diharapkan dapat lebih meningkatkan sistem informasi akuntansi dan pengawasan keuangan agar kualitas laporan keuangan semakin baik. dikarenakan aspek tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor BPKAD Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando, G. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Universitas Negeri Padang*, Hal.27.
- Mahayuni, N. P. S., Yuniarta, G. A., & Julianto, I. P. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *Akuntansi*, 8(2), 4.
- Pujiswara, I. B., Herawati, N. T., & Kadek, N. Ss. (2014). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). *Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 2(1).
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232.
- Halim, Abdul 2004 Manajemen keuangan daerah. YKPN yogyakarta.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Manajemen*.Bandung:Alfabeta.
- Modul SIA ; Dunia Akuntansi dan Manajemen, 2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 2012 Salemba Empat, Jakarta.

Meta Dewi Rianisanti, "Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Kabupaten Klaten)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Sukarta, 2017) H. 40.